



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

2021

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN**

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan inayahNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Diklat Industri Makassar tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Diklat Industri Makassar ini merupakan pedoman kerja dilingkungan BDI Makassar selama tahun 2021 maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2021 untuk menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri yang unggul, berbasis kompetensi dan berdayasaing.

Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan dalam perbaikan renstra ini. Akhir kata terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dan semoga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan tugas dilingkungan BDI Makassar pada tahun 2021.

Makassar, Januari 2020



**Kepala
Balai Diklat Industri Makassar**

C. Elisa Martina Katili, SH., MH.

Nip. **196403041990032001**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Maksud dan Tujuan 7
- C. Tugas Pokok dan Fungsi 9
- D. Ruang Lingkup 11

BAB 2 PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Hasil – hasil Pembangunan 16
- B. Arah Pembangunan Diklat 20

BAB 3 RENCANA KINERJA

- A. Sasaran 27
- B. Indikator Kinerja 31

BAB 4 PENUTUP

- A. Penutup 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian tersebut, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur

industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas (industri pangan) disusun untuk periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Program pengembangan industri prioritas untuk industri agro disusun untuk periode 2015-2019 yang masuk pada tahap I pembangunan nasional Indonesia yakni:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;
6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;
7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi;
8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi;
9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;
10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (Palm Oil Mill Effluent) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Sektor agroindustri akan menjadi fokus pengembangan industri di Indonesia. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. sektor agroindustri sebagai *leading sector*, karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasaran global, dapat menampung tenaga kerja sederhana dalam jumlah besar, dan sangat beragam variasi produknya

sehingga berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat meningkatkan cadangan devisa negara.

Selanjutnya, pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsepsi berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan inilah yang menempatkan IKM yang tergabung dalam sentra-sentra, menjadi variabel penting. Hal ini karena agroindustri, yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki *multiplier effects* tinggi karena keterlibatan berbagai komponen dalam masyarakat.

Balai Diklat Industri Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di sektor industri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha. Dengan adanya otonomi daerah, maka tupoksi tersebut ternyata banyak menghadapi berbagai kendala di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Agar UPT diklat yang ada di Kementerian Perindustrian lebih eksis di masa yang akan datang, maka perlu di arahkan ke spesialisasi sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing BDI. Khusus untuk BDI Makassar, yang mempunyai potensi dan spesialisasi dibidang pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan

Berkenaan dengan kesadaan diatas maka makin perlu ditanamkan kesadaran bahwa program pelatihan sumber daya manusia Indonesia mutlak diperlukan, meskipun merupakan investasi yang cukup mahal. Program pengembangan Sumber daya manusia merupakan suatu kekuatan yang diharapkan dapat menciptakan nuansa baru dalam upaya mempercepat pembinaan sumber daya manusia dengan kompetensi, kemampuan dan tingkat profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pembangunan sesuai dengan program pengembangan pada RIPIN 2015-2035 yakni

menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;

B. Maksud dan Tujuan

Balai Diklat Industri Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2021 berkewajiban untuk mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia industri/dunia usaha dan Aparatur untuk menjadi tenaga profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan. Balai Diklat Industri Makassar diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga akan dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah tersebut diatas, baik langsung maupun tidak langsung.

Dilihat dari tanggungjawab moralnya Balai Diklat Industri Makassar saat ini yang ditugaskan untuk melaksanakan diklat-diklat Sumber Dayan Manusia dengan spesialisasi kompetensi dibidang pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran strategis Balai Diklat Industri Makassar sebagaimana tergambar diatas tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya perumusan tujuan dan sasaran yang jelas serta langkah-langkah sistematis untuk mencapainya. Oleh karena itu di dalam Roadmap Balai Diklat Industri Makassar tahun 2021 dan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Makassar telah diupayakan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan dalam mendukung industri yang kuat, tangguh dan berdaya saing berbasis spesialisasi dan kompetensi.

Indikator Tujuan Utama terdiri dari

- Jumlah SDM industri yang memanfaatkan layanan diklat.
- Jumlah *stakeholder* yang bekerjasama dengan Balai Diklat Industri Makassar.
- Indeks kepuasan pelanggan (peserta diklat)

Tujuan yang ingin dicapai Balai Diklat Industri Makassar sebagaimana yang dikemukakan diatas pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terus dilaksanakan dengan berbagai langkah penyempurnaan. Agar implementasi dilapangan tidak keluar dari jalur yang sesungguhnya harus dilalui, ditetapkan pula kebijakan operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan program yang merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan.

Segepan jajaran Balai Diklat Industri Makassar harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempedomani berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program seperti kesamaan pandang bahwa sangatlah penting untuk meningkatkan kompetensi dalam lingkungan kerja yang kondusif, memperkuat kerja internal eksternal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Balai Diklat Industri Makassar ke depan dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri Berbasis Kompetensi (3 in 1)
2. Pengembangan SDM BDI Makassar
3. Pengembangan Kurikulum dan Modul
4. LSP dan TUK
5. Strategi Promosi
6. Monitoring & Evaluasi program/kegiatan
7. Pengadaan sarana dan prasarana lembaga
8. Gaji dan Tunjangan
9. Operasional dan pemeliharaan kantor

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Diklat Industri Makassar adalah satuan kerja di bawah koordinasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Perindustrian, dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Diklat Industri yang menerangkan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri yang berbunyi:

1. Tugas (Pasal 2) :

Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri yang mana Balai Diklat Industri Makassar memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri meliputi pengolahan rumput laut, kakao dan rumah kemasan.

2. Fungsi (Pasal 3):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Diklat Industri Makassar menyelenggarakan fungsi :

- b. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembina industri.
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi.
- e. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri.
- f. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah.
- g. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri.
- h. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri.
- i. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha balai diklat industri.

3. Susunan Organisasi

Dalam rangka untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi BDI Makassar terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing- masing Sub. Bagian Tata Usaha dan Seksi- Seksi adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumusan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan incubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/incubator* bisnis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar I. 1. Struktur Organisasi BDI Makassar

D. Ruang Lingkup

Rencana kerja tahun 2021 yang mengacu pada Renstra yang berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2021 yang meliputi: Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan diklat sistem 3 in, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kakao, Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kemasan, Penyusunan modul diklat berbasis kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor industri, Fasilitas penunjang diklat, Fasilitas penunjang diklat, Menyelenggarakan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Keikutsertaan diklat/sosialisasi/seminar/workshop/pameran dll, Pengembangan kompetensi widyaiswara dan instruktur, Pengembangan kompetensi, Membayar gaji dan tunjangan pegawai, Pembangunan zona integritas,

Administrasi kepegawaian, Pengembangan SMM ISO 9001:2015, Penyusunan dan administrasi SIMAK BMN, Penyusunan program dan rencana kerja, Penyusunan rencana penggunaan workshop industri. Arahnya adalah tercapainya sasaran tahunan sebagai tahapan dari rencana strategi Balai Diklat Industri Makassar.

BAB II PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

1. Operasional

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi, hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan kondisi serta keuangan yang ada, dimana hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur dan Dunia Usaha selama kurun waktu tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2016

No	Diklat Tahun 2015	Target	Realisasi
1	Diklat Sistem Industri	2 Angkatan	50 Orang
2	Diklat Manajemen Modul 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ)	3 Angkatan	56 Orang
3	Diklat Pengolahan Kakao (Three In One)	4 Angkatan	100 Orang
4	Diklat Aneka Olahan Rumput Laut (Three In One)	5 Angkatan	125 Orang
5	Diklat Kemasan (Three In One)	5 Angkatan	125 Orang
6	Diklat Aneka Olahan Cokelat (Three In One)	4 Angkatan	100 Orang
7	Inkubator Bisnis	2 Angkatan	50 Orang
	JUMLAH	25 Angkatan	606 Orang

Tabel II. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2017

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Inkubator bisnis	1 Angkatan	25 Orang
2	Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ) Ankt I	1 Angkatan	0 Orang
3	Diklat Sistem Industri I	1 Angkatan	0 Orang
4	TOT SI dan TOT Ekin bagi WI	4 Orang	4 Orang
5	Pengembangan SDM Internal (<i>Capacity Building</i>)	35 Orang	35 Orang
6	Bimtek Penyusunan Kurikulum dan Silabi Pengolahan Kakao dan Rumput Laut	35 Orang	35 Orang
7	Pelatihan Pengolahan Cokelat	5 Orang	5 Orang
8	Diklat Pengolahan Kakao (Three In One)	5 Angkatan	120 Orang
9	Diklat Pengolahan Rumput Laut (Three In One)	5 Angkatan	80 Orang
10	Diklat Desain Kemasan (Three In One)	4 Angkatan	160 Orang
11	Diklat Aneka Olahan Cokelat (Three In One)	5 Angkatan	200 Orang
12	Diklat Aneka Olahan Rumput Laut (Three In One)	5 Angkatan	200 Orang
13	Rekrutmen, Pameran dan Monev Diklat 3 in 1	7 Orang	7 Orang
14	Penyusunan Draft Buku Diklat Berbasis Kompetensi (3 in 1)	25 Orang	25 Orang

Tabel III. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pengembangan SDM Internal (<i>Capacity Building</i>)	35 Orang	35 Orang
2	Bimtek Penyusunan Kurikulum dan Silabi Pengolahan Kakao dan RL	35 Orang	35 Orang
3	Pelatihan Pengolahan Cokelat	5 Orang	5 Orang
4	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Pengolahan Kakao Berbasis Kompetensi	3 Angkatan	150 Orang
5	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Pengolahan Rumput Laut Menjadi ATC/SRC Berbasis Kompetensi	5 Angkatan	250 Orang
10	Diklat 3 In 1 Pembuatan Aneka Olahan Cokelat Berbasis Kompetensi	7 Angkatan	350 Orang
11	Diklat 3 In 1 Operator Mesin Aneka Olahan Rumput Laut berbasis Kompetensi	5 Angkatan	250 Orang

Tabel IV. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Bimtek Penyusunan modul	35 Orang	35 Orang
2	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Pengolahan Kakao Berbasis Kompetensi	3 Angkatan	150 Orang
3	Diklat 3 in 1 Pembuatan Desain Kemasan Produk Pangan	10 Angkatan	500 Orang
4	Diklat 3 in 1 Operator Mesin Pengolahan Rumput Laut Menjadi ATC/SRC Berbasis Kompetensi	1 Angkatan	25 Orang
5	Diklat 3 In 1 Pembutan Aneka Olahan Cokelat Berbasis Kompetensi	6 Angkatan	310 Orang
6	Diklat 3 In 1 Operator Mesin Aneka Olahan Rumput Laut berbasis Kompetensi	5 Angkatan	250 Orang
7	Diklat 3 in 1 Pembuatan Aneka Olahan Berbasis Ikan	16 Angkatan	805 Orang

Tabel V. Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (3 in 1) Pada Balai Diklat Industri Makassar tahun 2020

No	Diklat Tahun 2020	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
1	Diklat 3 In 1 Pengolahan Rumput Laut	1 angkatan	50 orang
2	Diklat 3 in 1 Pengolahan Kakao	4 angkatan	200 orang
3	Diklat 3 in 1 Pengolahan Ikan	5 angkatan	250 orang
4	Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Rumput Laut	9 angkatan	450 orang
5	Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Berbasis Ikan	9 angkatan	450 orang
6	Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Berbasis Cokelat	9 angkatan	450 orang
7	Diklat 3 in 1 Operator Desain Kemasan 3 in 1	8 angkatan	400 orang
8	Diklat 3 in 1 Pengolahan dan Penyajian Kopi Barista	5 angkatan	250 orang
	JUMLAH	50 angkatan	2500 orang

Melihat tabel hasil - hasil perkembangan diklat aparatur dan dunia usaha dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

disektor industri, serta semakin meningkatnya kesadaran para peserta khususnya dunia usaha industri akan manfaat pelatihan bagi pengembangan usahanya.

2. Pembinaan

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan diklat senantiasa diadakan peningkatan-peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap sumber daya yang dimiliki yakni :

a. Aspek Kepegawaian

Peningkatan aspek kepegawaian dimaksud adalah untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan dapat menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri.

Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bidang industri antara lain :

- Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, seminar, workshop dan lain-lain.
- Mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan secara tepat waktu.
- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang setingkat lebih tinggi
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

b. Aspek sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana mempunyai peran yang cukup penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dimana dengan melalui anggaran rutin maupun pembangunan telah diupayakan peningkatan-peningkatan dengan maksud untuk menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang memadai/siap pakai.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal sebanyak 3,15
- b. Tenaga kerja industri kompeten sebanyak 2500 orang
- c. Jumlah Wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis 1 tenan
- d. Jumlah mitra industri yang melakukan kerjasama program dan penempatan alumni sebanyak 20 mitra
- e. Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Satuan Kerja unit pendidikan dengan nilai rata-rata 80
- f. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Satuan Kerja B
- g. Kelembagaan Pendidikan Non Formal Industri sebanyak 4 dokumen
- h. Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 1 layanan
- i. Layanan Perkantoran sebanyak 1 layanan

2 Arah Pembangunan Diklat

Peningkatan produktifitas dan daya saing industri nasional tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri dan menghindari kemungkinan kecenderungan deindustrialisasi. Keseimbangan antara peran pemerintah dan kekuatan internal industri menjadi kekuatan dasar pengungkit akselerasi pertumbuhan industri nasional dalam kerangka penguatan daya saing di pasar global maupun di pasar domestik. Dari banyak kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor industri, RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional akan banyak berperan dalam menentukan perkembangan sektor industri di masa depan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian tersebut, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan industri baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

7. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
8. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan

andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas (industri pangan) disusun untuk periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai
2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;

5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;
6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;
7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;
8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;
9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Program pengembangan industri prioritas untuk industri agro disusun untuk periode 2020-2024 yang masuk pada tahap II pembangunan nasional Indonesia yaitu industri berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah suatu produk karena mampu mengubah suatu produk mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi yang mempunyai nilai ekonomi dan daya guna yang lebih tinggi. Industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pengembangan IKM perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya IKM. Pengembangan IKM hendaknya menggabungkan keunggulan dan kearifan lokal dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Dengan adanya upaya tersebut, pengembangan IKM akan memperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah sehingga IKM akan berkiprah lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Sektor agroindustri akan menjadi fokus pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Agroindustri merupakan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil sumber daya pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan

tersebut. Kegiatan pengembangan agroindustri dalam pembangunan ekonomi nasional pada PJP II telah menjadikan sektor agroindustri sebagai *leading sector*, karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, mampu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di pasaran global, dapat menampung tenaga kerja sederhana dalam jumlah besar, dan sangat beragam variasi produknya sehingga berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dapat meningkatkan cadangan devisa negara.

Selanjutnya, pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsepsi berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan inilah yang menempatkan IKM yang tergabung dalam sentra-sentra, menjadi variabel penting. Hal ini karena agroindustri, yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki *multiplier effects* tinggi karena keterlibatan berbagai komponen dalam masyarakat.

Balai Diklat Industri Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di sektor industri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Industri dengan spesialisasi kompetensi sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing BDI. Khusus untuk BDI Makassar spesialisasi dan kompetensinya yakni pengolahan rumput laut, kakao dan desain kemasan.

Pembangunan sektor industri merupakan tulang punggung/ujung tombak bagi pembangunan ekonomi nasional, salah satu kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor industri adalah relative rendah produktifitas, profesionalisme serta terbatasnya penguasaan teknologi sumber daya manusia dibidang industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan daya saing sumber daya manusia Industri di era persaingan global ini diperlukan upaya dalam komitmen komponen masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama secara sinergi meningkatkan SDM industri Indonesia.

Sejalan dengan kondisi tersebut dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka arah pembangunan pendidikan dan pelatihan aparatur dan dunia usaha ditujukan pada Terwujudnya peningkatan daya saing sumber daya manusia industri yang diupayakan melalui :

1. Pengembangan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas
2. Pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
3. Pengembangan inovasi, kreatifitas dan etos kerja sumber daya manusia

Upaya untuk dapat merealisasikan hal-hal tersebut, langkah yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan modul
- b. Menyelenggarakan diklat sesuai dengan spesialisasi kompetensi (rumput laut, kakao dan kemasan)
- c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dengan dalam penyelenggaraan diklat.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai/siap pakai
- e. Menyelenggarakan Monitoring pasca diklat dalam rangka peningkatan kualitas diklat yang diselenggarakan di BDI Makassar.

BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan dibidang pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan dan memahami kekuatan dan kelemahan yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar yang melaksanakan diklat SDM Industri, maka perlu didukung program operasional, program pembinaan, dan program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana diklat dalam mewujudkan tujuan BDI Makassar tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Diklat Industri Makassar untuk periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

- Sasaran Kegiatan Pertama (SKI) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri”

Indikator Kinerja

- a. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

B. Sasaran Strategis Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)

- Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Indikator Kinerja

- a. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional dari 0 pada 2020 menjadi 2 sertifikasi pada 2024.
- b. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh dari 5 tenant menjadi 12 tenant pada 2024.

C. Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

- Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3), yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”,

Indikator Kinerja

- a. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar
- Sasaran Kegiatan Keempat (SK4), yaitu: “Terwujudnya birokrasi Balai Diklat Industri Makassar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”,

Indikator Kinerja

- a. Nilai laporan keuangan BDI Makassar meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 75 pada 2024.
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar meningkat dari 70 persen pada 2020 menjadi 75 persen pada 2024.
- c. Nilai kearsian BPSDMI meningkat dari 0 pada 2020 menjadi 80 pada 2024.
- Sasaran Kegiatan Kelima (SK5), yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”

Indikator Kinerja:

- a. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BDI Makassar meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 73 pada 2024
- Sasaran Kegiatan Keenam (SK6), yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”

Indikator Kinerja:

- a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti meningkat dari 90 persen pada 2020 menjadi 93 persen pada 2024.

- b. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) meningkat dari level 1 pada 2020 menjadi level 3 pada 2021

Rencana Teknis:

- Pemeliharaan kendaraan operasional BDI Makassar
- Pengelolaan listrik, telepon dan jaringan
- Pengelolaan keamanan dan kebersihan
- Operasional dan pimpinan
- Pemeliharaan peralatan kantor dan pendidikan
- Menyusun Dokumen Perencanaan
- Menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan
- Menyusun Administrasi Bmn Dan Tata Kelola Arsip
- Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dan Manajemen Kinerja
- Membangun/merenovasi Gedung/bangunan Perkantoran
- Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Widyaiswara Dan Instruktur atau internal pegawai BDI Makassar
- Membayarkan gaji dan Tunjangan Pegawai

Berdasarkan arah dan sasaran tersebut dan sesuai dengan usulan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2021, maka disusun rencana kerja Balai Diklat Industri Makassar tahun anggaran 2021 sebagai berikut

1. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan
 - a. Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi
 - Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal Dengan Lembaga Pendidikan Non Formal Dan Lembaga Non-pendidikan
 - Penyusunan Modul Diklat Penyelia Halal
2. Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat
 - a. Menyelenggarakan Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri
3. Pelatihan Bidang Industri
 - a. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Rumput Laut

- b. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kakao
 - c. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Kemasan
 - d. Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 In 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri
 - e. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 In 1 (pelatihan, Sertifikasi, Dan Kompetensi)
4. Program Dukungan Manajemen
- a. Layanan Perkantoran
 - b. Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal

B. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan sejauhmana tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan faktor, masukan, luaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar tahun 2021, telah disusun Indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel VII. Target Kinerja BDI Makassar 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target
SK1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri		
	1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	3100
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan		
	1 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertifikasi	0
	2 Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	9
SK3	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri		
	1 Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Makassar	Persen	50

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target
SK4	Terwujudnya Birokrasi BDI Makassar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima		
	1 Nilai laporan keuangan BDI Makassar	Nilai	70
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BDI Makassar	Nilai	70
	3 Nilai kearsipan BDI Makassar	Nilai	75
SK5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian		
	1 Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BDI Makassar	Indeks	58
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien		
	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	persen	91,5
	2 Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BDI Makassar merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat satuan kerja.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana kinerja ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan Balai Diklat Industri Makassar dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Rencana kinerja seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Diklat Industri Makassar tahun 2021 ini berpedoman pada Rencana Strategi Balai Diklat Industri Makassar, hal ini dimaksudkan untuk melihat deviasi pencapaian sasaran yang sesuai perkembangan lingkungan strategi dan faktor-faktor yang berpengaruh lainnya seperti ketersediaan anggaran, sehingga diharapkan dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya

Dengan rencana kinerja ini dapat dilihat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana indikator kinerja setiap kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai sesuai rencana.